



MediaTrend 14 (2) 2019 p. 294-304

Media Trend

Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan

<http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend>



Analisis Potensi Pembentukan Bank Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Dusun Celungan, Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)

Yogi Pasca Pratama^{1*}, Bhimo Rizky Samudro², Sutomo³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

Informasi Artikel

Sejarah artikel:
Diterima Agustus 2019
Disetujui Oktober 2019
Dipublikasikan Oktober 2019

Keywords:
Waste Bank,
Community Economics,
Waste Management

ABSTRACT

This study aims to describe the waste management system in Celungan, Sapen Village, Sukoharjo then compare with the pattern that occurs in established waste banks. The results of the comparison are used to analyze the potential development of existing waste management systems to be developed into a waste bank system. The results of the study show the general pattern needed to establish a waste bank, namely the awareness and participation of the community, as well as the clarity of the management structure and the system of the waste bank being run. What happened at the research site was community awareness about waste management, but it was not balanced with the support of a good management system. So that development efforts are needed in the form of training, preparation of management structures, preparation of waste bank systems, and support for necessary facilities.

© 2019 MediaTrend

Penulis korespondensi:
E-mail: yogipasca@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.6018>
2460-7649 © 2019 MediaTrend. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kelestarian lingkungan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Perkembangan masyarakat, baik jumlah maupun intensitas dan variasi kegiatan yang dilakukan berdampak pada degradasi kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah sampah, dimana sampah merupakan konsekuensi nyata dari meningkatnya aktivitas manusia. Sampah atau limbah merupakan residu produksi yang dihasilkan berbagai pihak dalam berbagai bentuk kegiatan. Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi (Azwar, 1990).

Berdasarkan sumbernya, sampah dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sampah dari permukiman atau rumah tangga dan sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti sampah dari pasar, daerah komersial, dan lain sebagainya. Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dinamakan dengan sampah domestik. Sampah non-domestik adalah sampah yang berasal misalnya dari limbah industri. Sampah domestik di perkotaan dikenal dengan istilah *municipal solid waste* (MSW) (Damanhuri dan Padmi, 2010). Sistem manajemen MSW dikenal sebagai *municipal solid waste management* (MSWM).

Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menimbulkan masalah sampah di masyarakat. Pengelolaan sampah secara sederhana mengikuti pola kumpul-angkut-buang. Pola ini sebenarnya cukup membantu kebersihan lingkungan terutama pada lingkungan rumah tangga, akan tetapi memunculkan masalah berikutnya yaitu penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara ataupun akhir yang sering terjadi utamanya di daerah perkotaan. Undang-Undang Nomor 18 Ta-

hun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Perubahan paradigma diperlukan dalam mewujudkan sistem manajemen sampah yang baik. Paradigma kumpul-angkut-buang harus dimodifikasi atau jika perlu diganti dengan memasukkan proses pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu yaitu rumah tangga. Penanganan sampah mulai dari tempat terbentuknya sampah menjadi salah satu jalan keluar agar tidak terjadi penumpukan sampah di tempat pembuangan.

Kastaman dalam Suryani (2014) mendefinisikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Douglas, et al. (1994) menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup yang penting, terutama tanah, infrastruktur, dan pelayanan.

Sistem manajemen sampah berbasis komunitas dapat dilakukan salah satunya dengan menjalankan sistem bank sampah. Tujuan utamanya adalah menangani sampah sedini mungkin dengan melibatkan partisipasi komunitas. Pemberlakuan sistem bank, diharapkan lebih memotivasi masyarakat sehingga mengubah persepsi masyarakat yang awalnya memandang sampah adalah barang tidak berguna menjadi komoditas yang bernilai jual dan mendatangkan keuntungan.

Salah satu daerah di Kabupaten Sukoharjo, yaitu di Desa Sapen. Khusus-

nya di Dusun Celungan, Desa Sapen, belum ada pengelolaan sampah dengan manajemen yang baik. Pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri oleh kelompok Karang Taruna Desa yang secara berkala mengumpulkan sampah dari rumah warga dan menjualnya. Akan tetapi upaya ini masih belum mampu menangani timbulan sampah di lokasi tersebut.

Apa yang terjadi di Dusun Celungan, Desa Sapen, Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu embrio yang baik dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah. Hal ini tercermin dari inisiatif warga utamanya komunitas pemuda untuk terjun langsung dalam menangani sampah. Atas dasar potensi tersebut, tentu komunitas pengelolaan sampah ini masih bisa dikembangkan. Serta di sisi lain perlu diadakan kajian secara sistematis untuk memetakan bagaimana sistem manajemen sampah yang sesuai untuk diterapkan di lokasi, serta bagaimana manfaat yang dapat diharapkan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai potensi pembentukan Bank Sampah di lokasi penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menelaah pola pendirian dan berjalannya Bank Sampah yang telah mapan di daerah lain, kemudian membandingkan dengan kondisi terkini pengelolaan sampah yang ada di lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan ini, akan dideskripsikan mengenai kondisi bank sampah yang telah mapan, kemudian membandingkan dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk mendeskripsikan kondisi terkini yang terjadi di lokasi penelitian. Data ini berupa catatan observasi lapangan dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder

berupa terbitan ilmiah yang digunakan untuk mendeskripsikan pola bank sampah yang telah mapan.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu kajian literatur, observasi, dan wawancara. Kajian literatur digunakan untuk mencari pola bank sampah yang telah mapan di daerah lain di Indonesia. Literatur yang digunakan berupa jurnal ilmiah, buku, dan lain sebagainya. Observasi dan wawancara dilakukan langsung dengan turun ke lapangan, yaitu di Dusun Celungan, Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang dilakukan pada periode Mei-Juni 2019. Wawancara juga dilakukan untuk memperdalam data yang diperoleh dengan narasumber dari pengelola sampah, warga, dan pemerintah setempat.

Analisis data dilakukan dengan cara memilah, mengorganisasikan, dan menggabungkan data yang ada untuk dapat menjawab masalah penelitian. Analisis ini ditujukan untuk mendeskripsikan pola bank sampah yang telah mapan untuk kemudian dikomparasikan dengan kondisi terkini di lokasi penelitian. Dari hasil perbandingan ini maka disusun kemungkinan pengembangan dari potensi pendirian bank sampah di lokasi penelitian.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN **Contoh Penerapan Bank Sampah di Indonesia**

Pembahasan ini diawali dengan berbagai contoh pengelolaan sampah yang diselenggarakan dalam bentuk bank sampah. Contoh-contoh Bank Sampah yang dipilih berdasarkan literatur yang ditemui dalam penelitian. Dengan adanya deskripsi dari contoh pengelolaan sampah yang berhasil menerapkan Bank Sampah, dapat ditarik suatu pola yang memungkinkan dilakukannya replikasi di daerah lain, termasuk di lokasi penelitian.

1. Bank Sampah Barokah Assalam

Bank Sampah ini berdiri sejak tahun

2009 dan diklaim sebagai Bank Sampah yang pertama kali berdiri di Kota Padang.

Lokasi Bank Sampah ini terletak di komplek perumahan Dangau Teduh Kota Padang. Pendirian Bank Sampah Barokah Assalam terwujud atas kerjasama Bapeldalda Kota Padang dengan warga perumahan Dangau Teduh untuk menggagas manajemen dan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan (Syafri, 2013).

Perumahan Dangau Teduh tempat berdirinya Bank Sampah Barokah Assalam merupakan perumahan yang dapat dikategorikan sebagai perumahan elit dengan penghuninya sebagian besar merupakan kelas menengah. Perumahan ini juga tidak mengalami masalah sampah yang pelik, karena sebelumnya memang sudah tertata rapi dan terjaga kebersihannya. Paradigma awalnya, warga perumahan Dangau Teduh mengelola sampah dengan cara mengumpulkan sampah di masing-masing rumah tangga, kemudian membuang sampah ke tempat pembuangan atau ke tukang sampah yang bertugas di perumahan ini. Sehingga sampah dipahami sebatas kebersihan lingkungan, dengan membuangnya dan tidak dengan pengelolaan terlebih dahulu (Syafri, 2013).

Setelah adanya inisiasi Bank Sampah, paradigma warga tentang sampah sedikit berubah. Sampah setelah itu dipandang memiliki nilai guna, sehingga berimplikasi pada perlakuan sampah yang berbeda. Sampah rumah tangga yang dihasilkan, kemudian dikumpulkan dan dipilah di tingkat rumah tangga. Dan anggota keluarga yang tadinya tidak biasa berbau dengan sampah rumah tangga mereka, menjadi ikut memilah sampah mereka sendiri (Syafri, 2013).

Jika ditinjau dari aspek inisiasi pendirian bank sampah, ide berawal dari hasil kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Uniknya, meskipun tidak mengalami masalah sampah, dalam artian sudah ada sistem pengelolaan sam-

pah melalui tukang sampah, inisiasi bank sampah tetap dapat dijalankan. Partisipasi masyarakat juga tergolong cukup aktif. Perubahan paradigma masyarakat dalam mengelola sampah menjadi kunci utama. Pandangan masyarakat pada sampah berhasil berubah dari barang yang tidak berharga menjadi sesuatu yang bernilai jika dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Bank sampah Barokah Assalam disusun dan dijalankan layaknya konsep Bank pada umumnya. Organisasi disusun dengan memilih direktur, bendahara, teller bank, nasabah, dan pemberian buku rekening ke nasabah yang berisi saldo tabungan. Tabungan dalam Bank Sampah tentunya dengan menggunakan sampah, kemudian dinilai dan dimasukkan ke masing-masing rekening nasabah. Sekali menabung, tabungan nasabah berkisar Rp3.000,- hingga Rp35.000,-. Tabungan ini sewaktu-waktu dapat diambil oleh nasabah jika memang dikehendaki (Syafri, 2013).

Sampah yang disetorkan ke Bank Sampah dan sudah divalusi, tidak semuanya masuk ke rekening nasabah. Untuk menghidupkan roda administrasi, maka dari sampah yang dikumpulkan dan dinilai, 70 persen dari nilai sampah diterima nasabah, 25 persen untuk biaya administrasi dan operasional Bank Sampah, dan 5 persen dialokasikan untuk infak di masjid setempat (Syafri, 2013).

Pembagian tanggung jawab yang jelas pada pengurus menunjukkan struktur organisasi yang baik. Sumber daya manusia juga mencukupi. Hal ini seiring dengan sistem penerapan bank sampah yang cukup baik yang ditunjukkan dengan penerapan buku rekening, dan sistem pembagian yang jelas dari sampah yang dijual pada bank sampah. Dengan administrasi bank sampah yang dapat berdiri sendiri, keberlanjutan sistem organisasi ini menjadi lebih terjamin.

Penanganan sampah utama yang dilakukan oleh Bank Sampah setelah sam-

pah terkumpul, yaitu dengan menjualnya ke pengepul. Harga jual kepada pengepul sama dengan harga beli sampah dari nasabah, sehingga Bank Sampah tidak mengambil margin keuntungan dari tahap ini. Sementara itu, tidak semua sampah yang terkumpul bisa dibeli oleh pengepul, contohnya seperti sampah plastik yang notabene menjadi sampah terbesar warga ternyata tidak bisa dijual ke pengepul. Menanggapi persoalan tersebut, Bank Sampah membentuk divisi khusus yang mengolah sampah plastik menjadi berbagai barang kerajinan, seperti tas, sarung laptop, kotak pensil, payung, dan lain-lain. Sistem pembagiannya adalah 90 persen untuk nasabah yang memproduksi, 7,5 persen untuk Bank Sampah, dan 2,5 persen untuk infak masjid (Syafri, 2013).

Sumber daya manusia yang mengelola bank sampah juga cukup baik. Terstruktur organisasi menunjukkan kecukupan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sarana dan prasarannya memang tidak ditemukan secara jelas. Transparansi dan pembagian valuasi sampah yang dikelola bank sampah menjadi salah satu kunci utama berjalannya bank sampah ini.

Kehadiran Bank Sampah ini membawa berbagai implikasi dalam sosial ekonomi warga. Pertama tentunya perubahan paradigma warga mengenai sampah. Kedua, meningkatkan pemasukkan rumah tangga dari penjualan sampah. Kemudian ketiga, bank sampah ternyata mampu meningkatkan solidaritas warga perumahan Dangau Teduh yang pada awalnya sangat minim dalam bersosialisasi karena tidak ada institusi yang mewadahi mereka (Syafri, 2013).

2. Bank Sampah Mutiara

Bank Sampah Mutiara diresmikan pada tahun 2012, terletak di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Melalui Bank Sampah Mutiara, paradigma masyarakat dalam memandang sampah yang awalnya tidak berguna

dan dibuang begitu saja, dapat berubah dalam memandang sampah yang memiliki nilai dan harga melalui pengelolaan yang baik (Novianti, 2013).

Masyarakat tempat berdirinya Bank Sampah merupakan masyarakat yang tergolong aktif dalam melakukan kegiatan sosial. Selain itu, pendirian Bank Sampah juga dilandasi oleh mewabahnya penyakit demam berdarah. Sehingga warga berinisiasi untuk melakukan perbaikan pengelolaan sampah sehingga dapat mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk pada tempat-tempat yang sampahnya tidak terkelola dengan baik (Novianty, 2013). Hal ini sama seperti pendirian Bank Sampah Gemah Ripah di Desa Badegan, Kabupaten Bantul pada tahun 2008 yang juga terjadi banyak kasus demam berdarah (Suryani, 2014).

Bank Sampah ini juga dirancang sebagaimana Bank pada umumnya, dengan jam buka kantor yang disesuaikan dengan situasi, yaitu jam 15.30 WIB hingga 18.00 WIB pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, serta jam 08.00-10.00 WIB pada hari Minggu. Hal ini dirancang untuk mengakomodasi waktu senggang yang dimiliki warga. Sifat dari kepengurusan di Bank Sampah Mutiara bersifat sukarela. Setiap nasabah diberi nomor rekening, buku tabungan, dan tiga tas untuk memudahkan pemilahan sampah. Saat ini, nasabah individual yang ikut serta sebanyak 150 KK (Novianty, 2013).

Bank sampah ini memiliki dua sistem tabungan, yaitu tabungan sampah individual dan komunal. Pada tabungan individual, warga yang menjadi nasabah harus membawa sampah yang telah dipilah di rumah tangga masing-masing untuk kemudian disetorkan ke Bank Sampah. Sedangkan pada tabungan komunal, warga tidak perlu membawa sampahnya langsung ke Bank Sampah, tetapi cukup dikumpulkan di rumah masing-masing untuk kemudian diakumulasi dengan warga lain, baru kemudian diangkut ke Bank

Sampah (Novianty, 2013).

Melalui Bank Sampah, nasabah juga dapat melakukan transaksi simpan pinjam. Jika warga hendak meminjam uang, maka dikenakan biaya administrasi sebesar 5 persen, dan kemudian tanpa dikenakan bunga pinjaman. Pinjaman maupun tabungan nasabah dapat diambil atau dikembalikan dalam jangka waktu tiga bulan (Novianty, 2013).

Dampak yang dirasakan dengan berdirinya Bank Sampah Mutiara yaitu meningkatnya kebersihan lingkungan. Kemudian perubahan paradigma masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

3. Bank Sampah Malang

Bank Sampah Malang didirikan pada tahun 2011 yang diprakarsai atas kerjasama Pemerintah Kota Malang dan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) Distribusi Jawa Timur. Bank Sampah Malang direncanakan sebagai wadah untuk membina, melatih, mendampingi, serta membeli dan memasarkan hasil kegiatan pengelolaan sampah dari hulu/sumber masyarakat Kota Malang. Tujuannya agar dapat mengurangi sampah di TPS/TPA dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui pemanfaatan sampah dengan program 3R (Suryani, 2014).

Bank Sampah Malang awalnya berasal dari Paguyuban Kader Lingkungan bentukan DKP, kemudian dari proses sosialisasi kelestarian lingkungan munculah ide konkrit untuk mendirikan Bank Sampah. Bentuk hukum dari Bank Sampah ini adalah koperasi. Pengurusnya terdiri dari 5 orang anggota DKP dan 16 orang dari warga dengan masa kepengurusan selama 3 tahun (Suryani, 2014). Bank Sampah ini merupakan salah satu bank sampah yang besar dan dengan struktur organisasi yang baik. Suryani (2014) mendeskripsikan bahwa sampai April 2013, 282 Unit BSM Masyarakat (yang aktif 90 persen), 169 Unit BSM Sekolah (yang aktif 60 persen),

24 Instansi (aktif), 434 Individu (aktif) dan lapak/pengepul 5 unit. Sedangkan, total jumlah nasabah sampai Juli 2013 sebesar 22.000 nasabah. Struktur organisasinya terdiri dari Direktur, Divisi Pemberdayaan dan Pengambilan, Divisi Operasional, Divisi Produksi, Bagian Administrasi, Rumah Tangga dan Usaha, serta Keuangan. Pembinaan tetap dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan CSR PLN.

Suryani (2014) juga mengungkapkan jika sebagian besar nasabah adalah warga yang berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan kelompok warga dari kelas menengah ke atas masih sulit melakukan kegiatan bank sampah secara berkelompok atau membentuk unit.

Bagi nasabah bank sampah, terdapat banyak program tabungan yang dapat dinikmati. Jenis-jenis tabungan tersebut seperti: tabungan regular, tabungan lebaran, tabungan sekolah, tabungan sembako, tabungan lingkungan, tabungan sosial (Suryani, 2014). Variasi jenis tabungan ini disesuaikan dengan keperluan nasabah dan bentuk simpanan yang akan diambil.

Sistem Pengelolaan Sampah di Lokasi Penelitian

Sistem pengelolaan sampah di Desa Sapen dilakukan secara mandiri oleh warga. Pengelolaan sampah dilakukan oleh kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Sapen. Melalui kelompok Karang Taruna ini, pengelolaan sampah dilakukan secara periodik.

Sistem pengelolaan sampah oleh Karang Taruna dilakukan dalam beberapa tahap. Pemilahan dilakukan di rumah tangga, kemudian sampah yang sudah dipilah di masing-masing rumah tangga akan diangkut oleh karang taruna secara berkala. Biasanya pengangkutan sampah ini dilakukan dalam kurun waktu seminggu sekali, dengan menggunakan mobil bak terbuka serta sukarelawan Karang Taruna sebagai

tenaga kerjanya. Sampah yang dikumpulkan oleh rumah tangga dan diangkut oleh karang taruna dibatasi pada jenis sampah tertentu, seperti kertas, botol plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Sampah yang dikumpulkan ini merupakan jenis sampah yang laku dijual kembali di pengepul barang bekas. Setelah sampah diangkut oleh pengelola, sampah kemudian dibawa ke tempat pengepul untuk kemudian dijual. Ketidadaan tempat penampungan sementara membuat proses angkut dan penanganannya (dijual ke pengepul) dilakukan dalam satu kali waktu selama satu hari. Setelah sampah dijual, uang hasil penjualan kemudian ditabung dalam kas Ibu PKK. Pembagian hasil penjualan sampah yang telah dikumpulkan dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu menjelang hari raya Idul Fitri. Hasil tabungan dari rumah tangga ini diwujudkan dalam bentuk sembako.

Dikaji secara lebih lanjut, apa yang terjadi di Desa Sapen terdapat dua dilema, pertama menunjukkan belum adanya sistem manajemen sampah yang terstruktur yang diselenggarakan pemerintah desa. Kondisi ini direspon cukup baik oleh masyarakat dengan mengadakan pengelolaan sampah melalui Karang Taruna. Karena intensitas pengumpulan yang rendah serta sampah yang diangkut Karang Taruna adalah sampah yang laku dijual ke pengepul, maka tidak semua sampah yang dihasilkan rumah tangga dapat terkelola. Contohnya sampah organik seperti daun-daunan kering, sisa bahan makanan, serta sampah anorganik seperti sampah plastik yang tidak diangkut oleh Karang Taruna diolah secara mandiri oleh rumah tangga dengan cara dibakar ataupun ditimbun. Pada sisi ini, sistem manajemen pengelolaan sampah di Desa Sapen masih sangat memungkinkan untuk diperbaiki lagi. Utamanya pada intensitas pengangkutan sampah serta jenis sampah yang dikumpulkan.

Inisiatif pengelolaan sampah menunjukkan ketertarikan komunitas un-

tuk berpartisipasi aktif dalam mengelola sampah. Hal ini menjadi modal yang berharga dalam menyusun pondasi sistem manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Adanya partisipasi komunitas, keberlangsungan manajemen pengelolaan sampah menuju pembentukan bank sampah menjadi lebih mungkin untuk dilaksanakan.

Skema pengangkutan sampah, sudah dilakukan secara terjadwal dengan tenaga dari sukarelawan karang taruna serta menggunakan mobil bak yang dipinjam dari warga. Sukarelawan sampah ini tidak terstruktur, sehingga tidak terdapat pembagian tanggung jawab secara jelas.

Setelah pengangkutan sampah, sampah juga tidak ditampung atau disortir lebih lanjut oleh pihak Karang Taruna. Hal ini dikarenakan tidak adanya lahan untuk menampung sementara dan melakukan pengolahan lebih lanjut. Selain itu, sumber daya yang ada juga tidak mendukung.

Sampah setelah pengangkutan langsung dibawa menuju tempat pengepulan barang bekas untuk menjual sampah yang berhasil dikumpulkan. Penentuan harga sampah mengikuti harga yang ditetapkan oleh pihak pengepul sampah. karena tidak terdapat proses pemilahan atau pengolahan lebih lanjut, sering kali harga sampah dihargai lebih rendah daripada yang seharusnya bisa didapat.

Hasil penjualan sampah ini kemudian disetorkan kepada pengurus Ibu PKK untuk kemudian disimpan. Hasil akumulasi penjualan sampah selama satu tahun akan dibagi secara merata bagi warga desa. Pembagian dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang biasanya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam bentuk pembagian sembako.

Potensi Pembentukan Bank Sampah

Kemungkinan pedirian bank sampah di lokasi penelitian merupakan upaya analisis dengan melihat bagaimana bank sampah yang sudah berdiri di tempat lain

dan disandingkan dengan kondisi terkini yang terjadi di lokasi penelitian. Dengan perbandingan ini, dapat diupayakan masukan-masukan untuk pengembangan pengelolaan sampah yang kemudian dapat diarahkan menuju pendirian bank sampah.

Inisiasi pengelolaan sampah di lokasi penelitian terwujud dari inisiatif warga sebagai respon ketiadaan pengelolaan sampah. Keaktifan dan kesadaran masyarakat ini dapat digunakan sebagai pondasi pendirian bank sampah. Karena pada akhirnya masyarakat yang akan tetap mengelola, sehingga keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan sebagai elemen yang fundamental.

Meskipun selama ini pengelolaan sampah dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, tetapi kehadiran pihak ketiga cukup diperlukan, terutama kehadiran Pemerintah Desa. Pihak ketiga ini, baik dari swasta maupun pemerintah, dapat berpartisipasi dalam mengatasi keterbatasan yang dihadapi Karang Taruna sebagai pengelola sampah. Perbaikan sistem organisasi tentu perlu bimbingan oleh pihak yang berpengalaman.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, maka bantuan modal untuk tempat penampungan sementara juga diperlukan. Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia Karang Taruna juga tidak dapat diabaikan, yang dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau *study banding* ke lokasi bank sampah yang telah mapan.

Sumber daya manusia dalam mengelola sampah di lokasi penelitian terdiri dari muda-mudi desa yang tergabung dalam Karang Taruna. Dari hasil observasi, kegiatan pengelolaan sampah dipandang sebagai salah satu rutinitas kegiatan Karang Taruna. Beberapa hal teknis ketika pengumpulan sampah juga kurang diperhatikan. Misalnya, pengelola sampah yang mengambil sampah tidak memperhatikan keselamatan dengan tidak menggunakan

baju khusus ataupun sarung tangan yang melindungi diri mereka ketika beraktivitas. Selain ketiadaan perlengkapan yang dibutuhkan, kesadaran akan hal ini juga belum terlihat. Selain itu, inisiatif dari pemuda juga masih rendah, misalnya belum ada upaya pemilahan kembali sampah yang dikumpulkan. Padahal dengan pemilahan ini, harga jual sampah yang dikumpulkan tentu akan berbeda, misalnya jika dari rumah tangga mengumpulkan jenis sampah kertas, jika dipilah terlebih dahulu antara kertas koran, kardus, hvs, dll, harga jual di pengepul juga akan meningkat. Selain itu, sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga juga tidak harus selalu dijual ke pengepul. Misalnya dibuat berbagai bentuk kerajinan seperti yang dilakukan pada bank sampah yang menjadi contoh. Penanganan dari masalah sumber daya manusia ini adalah dengan memberikan pelatihan serta *study banding* untuk melihat bagaimana bank sampah di daerah lain bekerja.

Segi sarana dan prasarana yang digunakan pengelola sampah masih sangat minim dan sangat perlu untuk dikembangkan. Pertama yang perlu diperjelas adalah kantor atau tempat operasional pengelola sampah. Mengatasi hal tersebut, sebenarnya dapat menggunakan '*basecamp*' Karang Taruna berupa bangunan permanen yang dapat difungsikan juga sebagai kantor pengelola sampah dengan jam operasional tertentu. Diharapkan kegiatan sampah menjadi lebih fokus dan intens, serta masyarakat dapat lebih mudah menemui pengelola sampah jika ada keperluan yang perlu disampaikan kepada pengurus pengelola sampah. Seiring dengan adanya kantor ini, juga diperlukan berbagai alat perlengkapan kantor untuk keperluan pencatatan dan kegiatan kantor. Kedua, tempat pemilahan sampah.

Bank Sampah memiliki tempat penampungan sementara berupa bak atau kolam yang dirancang sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk menampung sampah

yang dikumpulkan dari warga untuk kemudian dilakukan pemilahan sehingga lebih mudah dan bervariasi pengolahan sampah tersebut. Melalui pemilahan, harga sampah yang dijual kepada pengepul dapat ditingkatkan. Untuk jenis sampah yang tidak laku dijual kepada pengepul, dapat diolah dengan cara lain sehingga dapat dimanfaatkan kembali atau bernilai jual. Contohnya adalah sampah organik berupa sisa bahan makanan rumah tangga dapat diolah menjadi pupuk organik. Selain itu, sampah plastik kemasan berbagai produk dapat diolah menjadi berbagai bentuk kerajinan yang dapat dimanfaatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan satu lahan yang tidak terlalu besar sebagai tempat penyortiran.

Diperlukan bantuan dari pemerintah desa atau pihak lain untuk penyediaan lahan ini. Ketiga, alat transportasi yang digunakan pengelola sampah perlu diperhatikan kembali. Hal ini karena selama ini, mobil yang digunakan untuk mengangkut sampah adalah mobil milik warga, sehingga pengelola sampah tidak dapat menggunakannya dengan leluasa terutama ketika ingin menambah intensitas pengambilan sampah. Diperlukan suatu alat transportasi yang dimiliki pengelola sampah sendiri. Tidak harus berupa mobil, dapat juga berupa gerobak sampah yang dimodifikasi dengan motor, sehingga juga lebih murah dan lebih praktis karena dapat masuk ke gang-gang yang lebih kecil yang ada di desa Sapen. Dengan adanya alat transportasi sendiri, intensitas pengangkutan sampah juga dapat dilakukan lebih sering. Keempat, yang mungkin perlu diperhatikan adalah alat keselamatan yang digunakan pengelola sampah ketika bersinggungan dengan sampah. Hal ini ditujukan untuk menjamin keselamatan kerja dan kesehatan pengelola sampah.

Struktur kepengurusan pengelola sampah di desa saat ini memang belum tertata dengan baik, dengan pengelola sampah hanya mengandalkan tenaga su-

karelawan dari pemuda karang taruna yang pada hari pengumpulan sampah sedang ada waktu senggang. Selain itu, pembukuan dan penyimpanan uang dilakukan oleh kelompok Ibu PKK dan tidak dikelola sendiri oleh pengelola sampah. Dampak dari struktur ini adalah tidak terbaginya tanggungjawab kepada anggota karang taruna karena tidak mendapat beban tugas yang jelas.

Ketiadaan pembagian divisi atau bidang dalam kelompok pengelola sampah juga berdampak minimnya inovasi yang dikeluarkan dan tidak tersalurnya kreativitas pengelola sampah sesuai minat dan bidang keahliannya. Oleh karena itu diperlukan perbaikan struktur kerja dengan penunjukkan pengurus yang disepakati dan disahkan. Misalnya penunjukkan direktur, manajer operasional, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan keperluan dan sistem kerja yang hendak dibangun.

Adanya kesepakatan penunjukkan pengurus dan pembagian divisi dapat memperlancar alur kerja pengelolaan sampah. Hal ini karena setiap pengurus akan mempunyai beban tugas dan tanggung jawab tersendiri secara parsial yang dikoordinasikan oleh ketua pengelola sampah. Misalnya pembentukan divisi operasional yang bertanggungjawab atas pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah yang dikumpulkan; divisi keuangan yang bertanggungjawab atas valuasi sampah yang terkumpul serta menyimpan tabungan sampah dari dari warga; divisi pemasaran yang bertanggungjawab menjual sampah yang laku kepada pengepul, mengkreasikan jenis sampah lain yang tidak dapat dijual ke pengepul dan menjual ke pihak lain dalam bentuk barang yang bernilai guna.

Sistem pengelolaan sampah yang dijalankan saat ini di lokasi penelitian belum mencapai pada tahap bank sampah. Meskipun sudah ada embrio yaitu proses pengumpulan sampah dari rumah tangga

yang di valuasi menjadi nominal tertentu yang kemudian dikembalikan kepada warga dalam bentuk sembako.

Kejelasan pengurus serta struktur kepengurusan diperlukan untuk mengarahkan sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini menuju ke pembentukan bank sampah. Seperti yang diuraikan dalam berbagai contoh kasus bank sampah yang ada di daerah lain, sistem bank sampah pada intinya meniru sistem bank konvensional pada umumnya, yaitu sebagai perantara. Hal ini dapat diartikan untuk menjembatani warga yang memproduksi sampah yang pada awalnya tidak bernilai, kemudian dikumpulkan, dipilah, dan diolah melalui bank sampah agar bisa bernilai ekonomi. Sampah yang dibeli oleh bank sampah dari warga ini kemudian dinilai dan dimasukkan ke masing-masing rekening warga atau nasabah bank sampah. Pengambilan dan pengembalian simpanan pada bank sampah dapat bervariasi dan tidak harus dalam bentuk uang. Misalnya warga Desa Sapen mempunyai keinginan untuk membangun lingkungan rumah yang bersih dan indah, maka pengembalian tabungan bank sampah dapat diwujudkan dalam bentuk tanaman hias. Tanaman hias sendiri diusahakan oleh bank sampah dengan membeli dari sentra tanaman hias sekitar. Contoh lain, jika Desa Sapen hendak membangun lingkungan yang sehat dan bebas penyakit, pengembalian tabungan bank sampah dapat diwujudkan dalam bentuk obat anti nyamuk demam berdarah dan malaria.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar utama pendirian bank sampah adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat ini dapat berasal dari masyarakat sendiri atau hasil interaksi dengan pihak lain misalnya pemerintah atau swasta yang mempunyai kepentingan pendirian bank sampah. Perubahan paradigma akan sampah juga terlihat dari semua bank sampah yang telah

mapan. Masyarakat yang awalnya menilai sampah sebagai residu yang tidak bernilai menjadi berubah karena dengan adanya bank sampah ternyata sampah dapat menjadi komoditas yang memberikan keuntungan tambahan. Sedangkan yang terjadi di lokasi penelitian adalah manajemen yang kurang baik yang dilakukan pengelola sampah. Ketiadaan struktur kepengurusan yang jelas, tidak ada kejelasan pembagian tugas, sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi gambaran kurang baiknya sistem pengelolaan sampah.

Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya perhatian dari berbagai pihak terkait. Pemerintah Desa dapat berperan dalam membantu memfasilitasi sarana prasarana dan legalitas pengurus sampah. Akademisi juga dapat berperan dengan memberikan pelatihan dengan menghubungkan pada bank sampah yang telah mapan. Struktur kepengurusan dan sistem operasional pengelolaan sampah di lokasi penelitian juga dapat dikembangkan menuju pendirian sistem bank sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Azrul. (1990). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber.
- Challcharoenwattana, A., and Pharino, C. (2015). Co-Benefits of Household Waste Recycling for Local Community's Sustainable Waste Management in Thailand. *Sustainability*, 7: 7417-7437.
- Damanhuri, E. dan Padmi, T. (2010). *Diklat Pengelolaan Sampah*. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.
- Douglas, M., Lee, Y.S., and K. Lowry. (1994). Urban Poverty and Environmental Management in Asia. *Asian Journal of Environmental Management* 2 (1).
- Kodoatie, Robert J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nixon, H., Saphores, J.M. (2009), Information and the decision to recycle: Results from a survey of US households. *Journal Environmental Planning Management*, 52: 257-277.
- Novianty, Mita. (2013). Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. *Welfare State*, 2 (4).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Sejati, Kuncoro. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Singhirunnusorn, W., Donlankorn, K., Kae-whanin, W. (2012), Contextual factors influencing household recycling behaviours: A case of waste bank project in Mahasarakham municipality. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 36: 688-697.
- Suryani, Anih Sri. (2014). Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah. *Jurnal Asprasi* 5 (1).
- Suryani, Anih Sri. (2014). Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5 (1): 71-84.
- Syafrini, Delmira. (2013). Bank Sampah: Mekanisme Pendorong Perubahan Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus: Bank Sampah Barokah Assalam Perumahan Dangau Teduh Kecamatan Lubuk Begalung, Padang). *Humanus*, 12 (2): 155-167.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Wang, Fang, X. Peng, R. Wei, Y. Qin, and X. Zhu. (2019). Environmental behavior research in resources conservation and management: A case study of Resources, Conservation and Recycling. *Resources, Conservation & Recycling* 141 (2019) 431–440.
- Wijayanti, Dyah Retno, and Suryani, S. (2015). Waste Bank as Community-based Environmental Governance: A Lesson Learned from Surabaya. *5th Arte Polis International Conference and Workshop – “Reflections on Creativity: Public Engagement and The Making of Place”*, Arte-Polis 5, 8-9 August 2014, Bandung, Indonesia.